Radar Bali

Tiga Dewan Kota Diperiksa

Terkait Kasus Perdin, Tersangka Bisa Banyak

DENPASAR – Lama mengambang, dugaan korupsi dana perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar mulai menemui titik terang. Setelah menetapkan tersangka berinisial AP, Senin (18/7) sederet saksi kembali diperiksa. Mereka adalah tiga orang anggota dewan dan dua orang dari Bali Travel Daksina.

Data yang diterima *Jawa Pos Radar Bali*, sejatinya yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi sebanyak tujuh orang ■

▸ Baca **Tiga...** *Hal 31*

MAULANA SANDIJAYA/RADAR BALI

Syahrir Sagir

SAKSI YANG DIPERIKSA DALAM KASUS PERDIN

- Ketut Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Demokrat)
- I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar)
- I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Hanura)
- I Made Kayun (direktur Bali Travel Daksina) serta Gede Sutiawan (manajer marketing Bali Travel Daksina).

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 21

Radar Bali

Syahrir: Emangnya Bayar Berapa ke Kami?

■ TIGA...
Sambungan dari hal 21

Namun dua orang tidak hadir. Mereka berlima yang hadir di Kejari Denpasar masing-masing Ketut Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Demokrat), I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Hanura), I Made Kayun (direktur Bali Travel Daksina) serta Gede Sutiawan (manajer marketing Bali Travel Daksina).

Sementara dua orang tidak datang, yakni IB Putu Sudhayantana (travel Sunda Duta) dan Kadek Agus Arya Wibawa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi PDIP). Pantauan koran ini, masing-masing saksi diperiksa bergiliran. Rata-rata lebih dari satu jam mereka di ruangan tim pemeriksa. Paling akhir diperiksa adalah I Putu Oka Mahendra.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir mengatakan semuanya diperiksa karena terkait dengan materi penyidikan jaksa. Menurut Syahrir, untuk pemilik travel selain Bali Travel Daksina, juga diperiksa travel Sunda Duta. Sementara anggota dewan akan diperiksa semua secara bergantian. "Nanti semua anggota dewan akan diperiksa. Pokoknya semua anggota dewan akan diperiksa. Pemeriksaannya maraton," ujar Syahrir.

Disinggung akan ada kemungkinan tambahan tersangka selain AP, Syahrir menyebut tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Namun, saat disinggung dari mana calon tersangkanya, Syahrir malah berkelit. "Kemungkinan (tersangka lain) di seputaran sekretariat dewan dulu. Tapi, semua pihak yang terkait dan ada indikasi terlibat bisa jadi tersangka," jelasnya diplomatis.

Tapi, ada kabar AP dijadikan tumbal, sedangkan semua anggota dewan diselamatkan? Ditanya begitu, Syahrir terlihat terkejut. Jaksa asal Surabaya ini menegaskan, siapa pun bisa jadi tersangka yang ikut dalam perdin. Termasuk anggota dewan yang menjadi pelaku langsung perdin tersebut. "Pede (percaya diri, Red) banget dia (anggota dewan). Emangnya bayar berapa ke kami? Kami masih *clean*. Hampir semua anggota dewan ikut dalam perdin ini, jadi jangan pede dulu," tantangnya.

Terkait kerugian negara, Syahrir menyebut cukup besar. Bahkan, awalnya penghitungan kejaksaan tidak sampai Rp 1 miliar. Namun, setelah ada hasil audit BPKP Bali, ternyata kerugian negara membengkak tiga kali lipat dari penghitungan awal. "Hasil audit BPKP sudah ada, cuma secara resmi belum. Perhitungan kerugian kami kecil tidak sampai 1 miliar, ternyata setelah diaudit BPKP tiga kali lipat," tandas Syahrir.

Lebih lanjut Syahrir menjelaskan, modus operandi dugaan korupsi perdin dengan cara me-*mark up* anggaran perdin tahun 2013. Yang di-*mark up* adalah anggaran operasional anggota dewan selama melakukan perjalanan ke luar kota. Terutama anggaran untuk tiket. "Yang jelas ada selisih anggaran antara bulan Januari sampai April. Ada *mark up* anggaran," papar penghobi mobil tua ini.

Yang menarik, selisih dana tersebut sudah dikembalikan ke kas negara. Namun, hal itu tak membuat proses hukum berhenti. Syahrir membantah jika kejaksaan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Denpasar. Dia mengklaim kasus yang diusut Kejari Denpasar murni menindaklanjuti dari temuan audit BPK. Selama ini, pengusutan kasus Kejari Denpasar cukup minim. Alasan ini yang membuat Kejari Denpasar semangat menggeber kasus yang sudah muncul ke permukaan.

"Baik Perdin maupun PD Parkir, semuanya adalah temuan BPK. Kejari tidak ada titipan kasus. Semua murni karena kami ingin ada produk hukum asli Kejari. Karena selama ini nihil produk hukum asli hasil penyelidikan Kejari Denpasar," tukasnya.(**san/dit**)

2

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 31

Radar Bali

Ketua Anggap Tak Rugikan Negara

PIHAK DPRD Kota Denpasar tidak akan menghalangi upaya Kejari Denpasar untuk mengusut dugaan korupsi dana perjalanan dinas (perdin). Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat, A.A Susruta kepada *Jawa Pos Radar Bali*, Senin (18/7) mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menyelesaikannya."Silahkan saja, itu sudah kewenangan kejari," katanya.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengungkapkan dugaan korupsi ■

▸ Baca **Ketua...** *Hal 31*

Anggaran Perdin Rp 10 Miliar

■ **KETUA...**

Sambungan dari hal 21

perdin itu merupakan kesalahan administrasi. "Itu *kan* temuan BPK tahun 2013, yang merupakan kesalahan administrasi, namun sudah diselesaikan," jelasnya. Namun saat disinggung mengenai adanya kerugian negara, politisi PDIP ini tetap mengatakan permasalahan tersebut sudah diselesaikan. "Merugikan keuangan negara yang mana? *Kan* sudah dikembalikan uangnya, kalau tidak salah pada tahun 2013 juga," katanya.

Anggaran perdin DPRD Denpasar sendiri cukup besar. Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, selama setahun anggaran perdin mencapai Rp 10 miliar. Dalam sebulan anggota dewan berangkat minimal dua kali. Setiap berangkat, anggota dewan mendapat uang harian sebesar Rp 2,5 juta ditambah uang representatif Rp 500 ribu. Sehingga total sehari berangkat mendapat Rp 3 juta. Besaran uang saku wakil rakyat ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Tahun 2016.

Yang menjadi masalah, seluruh perjalanan dinas diatur pihak Setwan. Mulai tiket pesawat hingga hotel. Dewan sendiri tidak tahu anggaran akomodasi perdin. Untuk tidur biasanya di hotel bintang lima. Sementara pesawat menggunakan kelas bisnis. Dewan tinggal berangkat, dan tanda tangan terima uang saku. (**ara/dit**)

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016
Hal : 21 dan 31